

## Persepsi Publik Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Jayapura-Papua

PUGUH SUJARTA<sup>1\*</sup>, SUHARNO<sup>1</sup>, FARMAWATY<sup>2</sup>, LEONARDO A. NUMBERI<sup>2</sup>,  
IRMA RAHAYU<sup>2,3</sup>, MARSELINE G. MAILISA<sup>2</sup>, IRENE SUEBU<sup>2</sup>, ROMA M. MANALU<sup>2,4</sup>,  
WEHELMINA LAHALLO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Biologi (S2), FMIPA, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Magister Biologi (S2), FMIPA, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

<sup>3</sup>Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

<sup>4</sup>Program Studi Magister Manajemen Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

Diterima: 1 Desember 2020 – Disetujui: 22 Februari 2021

© 2021 Jurusan Biologi FMIPA Universitas Cenderawasih

### ABSTRACT

Papua has a huge diversity of natural resources which can be categorized as well managed compare to other areas in Indonesia. The city of Jayapura and its surrounding are arranged to become an urban area nowadays. As an impact, many sector has changing including its land use. This research aims to understanding the knowledge, perception, and assesment of people regarding the environment particularly in Jayapura and its environs. The research was conducted in Jayapura City, Jayapura Regency and Keerom Regency with sampling method using survey, questionnaire and documentation. This research revealed that 53.0-90.0% of respondent knowing about environmental management and most of them (90.0%) gained those information from educational institution such as schools. Regarding government participation in environmental management, respondent answered that it is around 69.0-76.0% while for infrastructure and monitoring it is around 52.4-74.0% and 41.0-70.6% respectively. Concerning the environmental condition and its management the rate was 6.20 which can be categoized as good.

**Key words:** people perception; environment; government; Jayapura.

### PENDAHULUAN

Provinsi Papua merupakan wilayah Indonesia Timur yang termasuk kaya akan keanekaragaman hayati. Pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Papua harus berwawasan lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam suatu strategi

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kota Jayapura secara administratif sebagai ibukota Provinsi Papua, dan berdekatan dengan dua kabupaten penyangga perekonomian yaitu Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Pertumbuhan pembangunan Kota Jayapura semakin pesat jika dibandingkan pada era tahun 1990-an. Demikian pula dengan pengembangan wilayah di kedua kabupaten tersebut. Pertumbuhan penduduk di ketiga wilayah ini bertambah secara signifikan sehingga akan memicu meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya alam.

Terkait pengelolaan lingkungan pada suatu kawasan, Hilborn (2007) mengungkapkan bahwa

---

\* Alamat korespondensi:

Program Studi Magister Biologi (S2), Fakultas  
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas  
Cenderawasih, Jayapura. Kampus Uncen Abepura,  
Jayapura, Papua. E-mail: cakpuguh69@gmail.com.

beberapa syarat dalam pengelolaan suatu kawasan meliputi: pola pemanfaatan sumberdaya yang benar, harus transparan dalam melibatkan seluruh stakeholder, adanya dukungan ilmu pengetahuan, adanya manfaat pemerataan, adanya kebijakan yang terpadu, membangun kemampuan dan kesadaran masyarakat, dan adanya dukungan masyarakat. Menurut Hawley (1986) dalam bukunya yang berjudul *Human Ecology* menyebutkan bahwa hubungan interaksi antara manusia dan lingkungannya sangat dekat, sebab manusia membutuhkan sesuatu dari lingkungan untuk kehidupannya.

Diarto *et al.* (2012) dan Azhar *et al.* (2015) menyebutkan bahwa semakin meningkatnya pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi, seperti konversi hutan menjadi area permukiman, kegiatan perikanan tambak, rekreasi, dan sebagainya telah memberi dampak negatif pada keberadaan ekosistem. Lebih dari itu, menurut Diarto *et al.* (2012), dan Narsuka & Sujali (2009), bahwa partisipasi masyarakat juga harus dilakukan guna mengelola dan memelihara secara terintegrasi bersama agar meningkatkan keberhasilan sistem pengelolaan lingkungan. Menurut Salim *et al.* (2018) konsep *Sustainable Consumption and Production* (SCP) penting untuk dipahami. Konsep ini bertumpu pada gagasan mengatasi eksternalitas negatif dengan mengurangi pemanfaatan sumber daya, penggunaan energi, limbah, dan polusi, disamping mempertahankan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Hasil survei sebelumnya terhadap tiga wilayah administratif di Jayapura menunjukkan akan kekayaan sumberdaya alam hayati. Berdasarkan penelitian terhadap sumberdaya alam hayati di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, terdapat keragaman ikan karang 38 jenis (Sujarta, 2015a), keragaman teripang 10 jenis (Sujarta *et al.*, 2009), dan keragaman plankton 38 jenis, dan ikan yang bernilai ekonomi juga melimpah (Sujarta *et al.*, 2011). Indikator yang demikian menunjukkan bahwa perairan laut yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura masih dikategorikan baik. Artinya bahwa habitat hidup biota tersebut yaitu ekosistem terumbu karang

dikategorikan baik pula. Selain itu, menurut Sujarta (2015b) mengungkapkan bahwa masyarakatnya juga mempunyai suatu kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam hayatinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi khususnya bidang lingkungan hidup. Pemahaman pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup, pendapat masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan penilaian masyarakat tentang kondisi lingkungan dan pengelolaannya khususnya di Kota Jayapura dan sekitarnya secara signifikan dapat dihubungkan dengan status kondisi dan kualitas lingkungan hidup. Kontribusi lain secara tidak langsung adalah sebagai dasar menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan khususnya wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

Kajian tentang persepsi publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup Kota Jayapura dan sekitarnya belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan, pendapat, dan penilaian masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kajian ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya, guna menguatkan kembali peran semua unsur masyarakat dan pemerintah dalam memperhatikan sistem pengelolaan lingkungan secara bersama-sama dan bijaksana.

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 5 bulan yaitu mulai bulan Juni–November 2020. Penelitian dilakukan di wilayah kawasan Jayapura secara umum, termasuk wilayah administrasi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

### Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: alat perekam berupa *handphone* android, kamera untuk dokumentasi

dan form kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Kuisisioner yang disusun mencakup beberapa aspek menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: data umum identitas responden, pengetahuan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, dan penilaian tentang lingkungan hidup, yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa pertanyaan/pernyataan terkait materi tersebut.

### Pelaksanaan Penelitian

Survei dilaksanakan di tiga wilayah administrasi, yakni: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Survei dilakukan dengan total sebanyak 231 responden. Sebagian besar responden berasal dari Kota Jayapura (61%), Keerom (22%), dan Kabupaten Jayapura (17%). Berdasarkan atas sebaran wilayah, berasal dari 10 distrik di Kota Jayapura (38 Kampung), 7 distrik di Kabupaten Jayapura (20 Kampung), dan 3 distrik dari Keerom (11 kampung), Jumlah responden sebagian besar dari kelompok wanita (74%) dan sisanya adalah pria (26%).

### Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, pendapat masyarakat tentang peran serta pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, dan penilaian masyarakat tentang kondisi lingkungan serta pengelolannya, dilakukan melalui langkah-langkah: 1) pemberian nilai jawaban responden, 2) menjumlahkan nilai keseluruhan dari masing-masing aspek, 3) mengelompokkan nilai yang diperoleh, dan 4) melihat persentase tingkat kecenderungan pada kategori yang ada, sehingga memperoleh informasi yang akurat.

Penentuan penilaian responden tentang kondisi lingkungan dan pengelolannya didasarkan dari nilai rata-rata dari setiap item pertanyaan dengan kisaran nilai 1-10 terhadap

jumlah responden secara keseluruhan (Sugiyono, 2012; Widoyoko, 2012). Analisis selanjutnya dilakukan penggolongan kategori penilaian.

Langkah berikutnya menghitung skor tertinggi ideal, skor terendah ideal, dan simpangan baku ideal. Penilaian hasil survei ini diperoleh mean ideal ( $M_i = 1/2 (10+1) = 5,5$ ) dan standar deviasi ideal ( $S_{di} = 1/6 (10-1) = 1,5$ ) (Tabel 1). Kriteria penilaian untuk menentukan tingkat keberhasilan dilakukan dengan skala angka 1-10. Kisaran nilai  $< 3,25$  menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup pada status *kurang*, kisaran nilai  $3,25-5,5$  artinya *cukup*, dan kisaran  $5,5-7,75$  artinya *baik*, dan nilai  $> 7,75$  artinya *sangat baik*.

Tabel 1. Interval untuk menentukan kategori hasil penilaian.

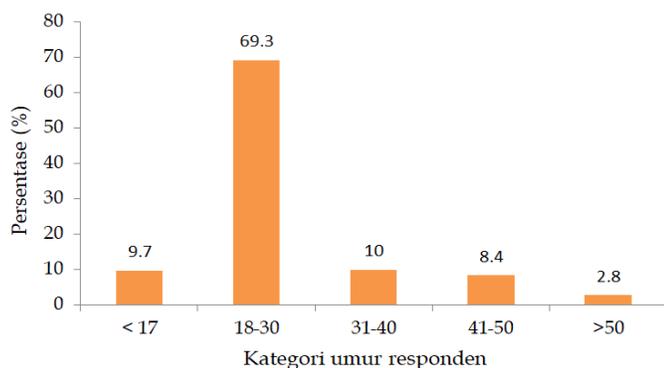
Interval	Kategori
$X > 7,75$	Sangat baik
$5,5 < X < 7,75$	Baik
$3,25 < X \leq 5,5$	Cukup
$X \leq 3,25$	Kurang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

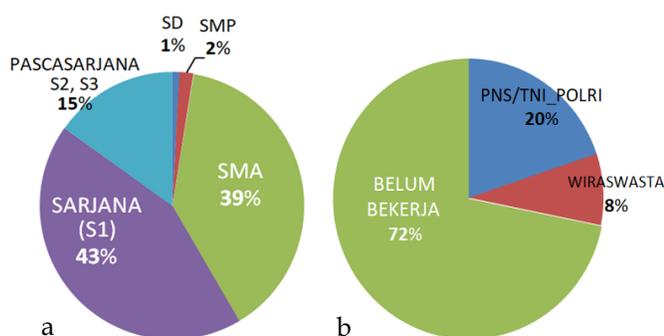
### Sebaran Data Responden

Hasil telaah menunjukkan bahwa sebaran data responden berdasarkan umur mempunyai distribusi normal (Gambar 1). Sebagian besar (69,3 %) responden mempunyai rentang umur 18-30 tahun, diikuti kisaran umur 31-40 tahun (10%), < 17 tahun (9,7%), 41-50 tahun (8,4%), dan hanya sedikit yang berumur  $> 51$  tahun (2,8%). Hal ini menunjukkan bahwa pendapat hasil penelitian ini melibatkan semua kelompok umur. Rentang 18-30 tahun merupakan umur yang produktif dan responsif terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Selain itu latar belakang umur/usia responden pada rentang 18-30 tahun sangat erat kaitannya dengan sebaran data responden berdasarkan tingkat pendidikan.

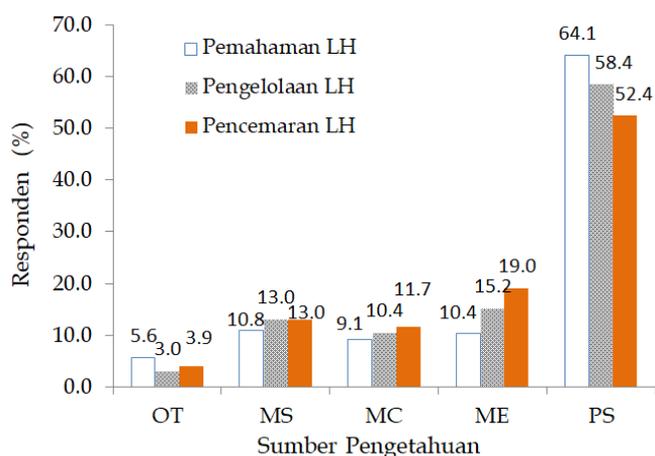
Sebaran data responden berdasarkan tingkat pendidikan juga sangat menarik untuk dicermati.



Gambar 1. Sebaran responden berdasarkan usia.



Gambar 2. Sebaran responden berdasarkan kategori pendidikan (a) dan pekerjaan (b).



Gambar 3. Sumber informasi tentang pengetahuan masyarakat dalam memahami, mengelola, dan terkait pencemaran lingkungan hidup. Ket: OT= orangtua, MS= media sosial, MC= media cetak, Me= Media elektronik, PS= pendidikan sekolah.

Berdasarkan latar belakang pendidikan responden menunjukkan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 43%, SMA 39%, status pascasarjana S2 dan S3 sebanyak 15 %, SMP 2 %, dan SD 1 %. Hasil demikian dapat kita hubungkan dengan data sebaran umur responden menunjukkan kisaran umur di antara 18-30 tahun (Gambar 2a). Namun ternyata terkait dengan pekerjaan responden menunjukkan bahwa responden mempunyai latar belakang yang belum bekerja lebih tinggi (72%), dibandingkan dengan status PNS/TNI/Polri (20%), dan wiraswasta (8%) (Gambar 2b). Jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan, maka diketahui bahwa terdapat 39 % responden adalah siswa-siswi SMA/ sederajat. Hal demikian kemungkinan berpengaruh terhadap latar belakang mereka yang mempunyai status belum bekerja.

Berdasarkan sebaran data responden akan mempengaruhi hasil survei seperti yang disampaikan oleh Fitriyani (2013). Perbedaan dan latar belakang kelompok sosial yang berbeda-beda cenderung memiliki persepsi yang berbeda-beda pula. Begitu pula hasil survei tentang persepsi publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Jayapura dan sekitarnya. Cara pandang responden terhadap pengelolaan lingkungan di Kota Jayapura dan sekitarnya serta penilaian kondisi lingkungannya akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda.

### Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berhubungan dengan penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat yang diketahui berkenaan tentang hal lingkungan, khususnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Chrystomo (2019) pengetahuan lingkungan merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya. Menurut sejarahnya, pengetahuan lingkungan berkembang dari ilmu sosiologi, demografi (geografi sosial) dan ekologi (ekologi manusia), serta planologi. Hubungan interaksi ini, menurut Salim *et al*.

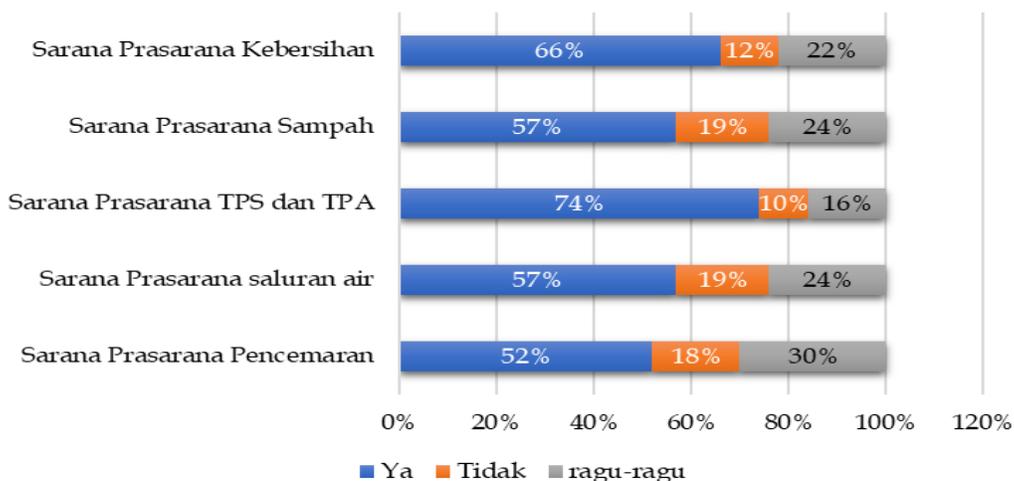
(2018) dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik sehingga berkesinambungan.

Menurut survei ini sebagian besar responden (90%) paham tentang pengetahuan lingkungan hidup, dan sisanya 10% masih ragu-ragu. Sumber pengetahuan responden terhadap pengetahuan lingkungan hidup sebagian besar (65%) responden memperolehnya melalui pendidikan/sekolah.

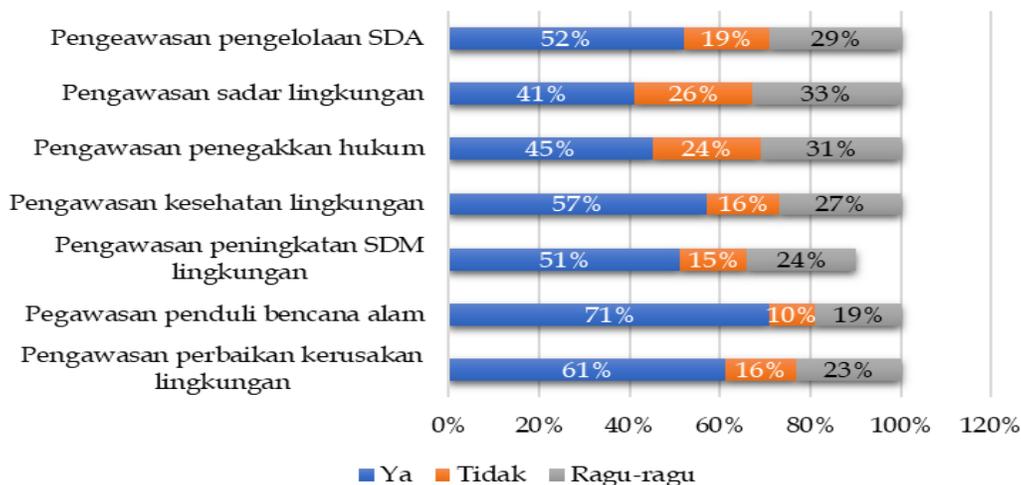
Selanjutnya, responden sebanyak 82,3% paham tentang pengelolaan lingkungan hidup, 3% tidak tahu, dan 14,7% menjawab ragu-ragu. Terkait pernyataan darimana pengetahuan responden terhadap pengelolaan lingkungan

hidup diperoleh? Sebagian besar (58,6%) responden menjawab bahwa pengetahuan tersebut diperoleh dari pendidikan atau sekolah dan 15% dari media elektronik (Gambar 3).

Hasil ini menunjukkan bahwa peran institusi pendidikan dalam memahami tentang lingkungan hidup sangat besar (64,2%), yang diikuti oleh peran media sosial (10,8%). Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah harus paham bahwa agar dapat mengerti melaksanakan peran perlindungan, dan aksi terkait pengelolaan lingkungan hidup harus diawali dari lingkungan pendidikan sekolah



Gambar 4. Pendapat masyarakat tentang macamnya sarana prasarana.



Gambar 5. Pendapat masyarakat tentang pengawasan pemerintah.

terendah (TK dan SD). Pemahaman individu yang diperoleh dari instirusi pendidikan diharapkan akan terus berlanjut hingga dewasa. Menurut Barrable (2019), pendidikan terkait lingkungan pada usia dini berpengaruh besar terhadap pendidikan lingkungan secara umum dan berkelanjutan. Pemahaman ini penting karena akan berdampak pada aksi keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam mengelola sistem lingkungan.

Menurut pendapat Rini *et al.* (2017) sikap merupakan wujud nyata perasaan seseorang yang dapat direfleksikan melalui kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu obyek. Sikap yang diperoleh dari proses psikologis seseorang yang tidak bisa diamati/dilihat secara langsung namun harus disimpulkan dari hal-hal yang dikatakannya atau dilakukannya. Sikap mengacu pada pertimbangan nilai individu terhadap perlindungan lingkungan. Selanjutnya, sikap lingkungan adalah kecenderungan umum yang terjadi pada seseorang dan dibentuk saat merespon dengan konsisten terhadap keadaan lingkungan dalam wujud suka (positif) atau tidak suka (negatif) berdasarkan tiga hal, yaitu: persepsi dan pengetahuan mengenai permasalahan dari lingkungan (merupakan komponen kognitif), perasaan atau emosi yang muncul terhadap lingkungan (merupakan komponen afektif), dan kecenderungan untuk berperilaku atau bertindak terhadap lingkungan (merupakan komponen konatif).

### Pendapat Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan oleh Pemerintah

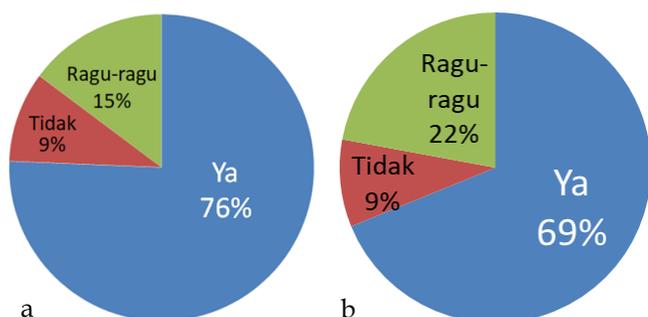
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapat adalah pikiran; anggapan; kepercayaan dan sikap orang yang umumnya berkisar pada masalah yang berhubungan dengan fakta dan keinginan; opini publik. Pengertian pendapat masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pikiran; anggapan; opini publik tentang pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah setempat berdasarkan fakta di masyarakat.

Menurut Purwanti & Susilowati (2012) bahwa pasal 33 ayat 3 UUD 1945 diungkapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup telah ada. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah, bahwa memberikan kewenangan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pernyataan tersebut menjadi tolok ukur perlunya menanyakan pendapat masyarakat tentang pengelolaan lingkungan di wilayah administrasi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Dengan demikian, sistem pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara maksimal melalui peraturan pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Secara umum, masyarakat masih menilai rendah terhadap sarana dan prasarana terkait pencemaran (52%), namun untuk sarana kebersihan cukup (66%), sedangkan sarana TPS dan TPA mencapai (74%) (Gambar 4). Masyarakat menilai bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, walaupun hanya sekitar 41-71%. Pendapat responden bahwa pemerintah peduli terhadap bencana alam dan siap melakukan tanggap darurat terhadap kerusakan lingkungan, namun menurut responden juga pemerintah kurang melakukan kampanye untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan (Gambar 5).

Tingginya persepsi masyarakat tentang peran pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan



Gambar 6. Pendapat masyarakat tentang peran pemerintah (a), dan sarana prasarana lingkungan (b).

Tabel 4. Nilai rata-rata penilaian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan pengelolaannya.

No	Pernyataan	Rerata nilai
1.	Kualitas perairan sungai	5,51
2.	Pencemaran perairan sungai	5,94
3.	Peran masyarakat terhadap perairan sungai	5,41
4.	Kualitas udara di sekitar lingkungan Jayapura	7,25
5.	Pencemaran udara di sekitar lingkungan Jayapura	5,45
6.	Peran masyarakat terhadap udara di sekitar lingkungan Jayapura	6,04
7.	Kualitas lingkungan hidup di sekitar lingkungan Jayapura	6,82
8.	Pencemaran lingkungan hidup	5,90
9.	Peran masyarakat terhadap lingkungan hidup	6,18
10.	Peran masyarakat terhadap lingkungan hidup	6,84
11.	Nilai Kesadaran dan disiplin lingkungan masyarakat	5,60
12.	Nilai sarana/prasarana lingkungan hidup	5,99
13.	Nilai pengendalian pencemaran lingkungan	5,87
14.	Nilai pemanfaatan sumberdaya alam hayati oleh masyarakat	6,46
15.	Nilai pelayanan kesehatan lingkungan	6,50
16.	Nilai dalam menanggulangi apabila terjadi bencana alam atau tanggap darurat	6,87
17.	Nilai secara keseluruhan tentang pengelolaan lingkungan hidup	6,78
<i>Rerata nilai secara keseluruhan</i>		<b>6,20</b>

lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat berharap banyak kepada pemerintah untuk mengelola lingkungan secara menyeluruh dan komprehensif. Masyarakat tetap percaya bahwa pemerintah akan mengelola lingkungan dengan baik. Lebih lanjut, pemerintah telah menyediakan sarana prasarana untuk pengelolaan lingkungan. Namun hanya 69% responden yang tahu (Gambar 6b), artinya 31% responden belum melihat secara nyata tentang sarana prasarana yang disediakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan publik, untuk menjamin seluruh masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Jadi hasil survei sudah sesuai dengan isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tersebut tentang peranserta pemerintah terhadap pengelolaan

lingkungan. Didukung pendapat Hilborn (2007) dalam tulisannya mengenai kegiatan pengelolaan suatu kawasan. Menurut Diarto *et al.* (2012) dan Narsuka & Sujali (2009), partisipasi masyarakat juga harus dilakukan guna mengelola dan memelihara secara terintegrasi bersama agar meningkatkan keberhasilan sistem pengelolaan.

### **Penilaian Masyarakat Tentang Kondisi Lingkungan dan Pengelolaannya**

Tujuan terakhir dalam penelitian ini adalah penilaian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan sebaran data responden, pengetahuan responden dan pendapat responden terhadap pengelolaan lingkungan, dilanjutkan penilaian kondisi lingkungan sekitar oleh masyarakat dengan tujuan mengukur kondisi lingkungan kita. Seperti pendapat Mardanugraha *et al.* (2002) dengan tema analisis dan penyusunan indeks pengelolaan lingkungan hidup daerah, hasil penilaian tersebut dapat digunakan dalam menentukan indeks pengelolaan.

Menurut Diarto *et al.* (2012) semakin meningkatnya pembangunan yang berorientasi

pada aspek ekonomi, seperti konversi hutan menjadi area permukiman, kegiatan perikanan tambak, rekreasi, dan sebagainya telah memberi dampak negatif pada keberadaan ekosistem. Menurut Hawley (1986) hubungan interaksi antara manusia dan lingkungannya sangat dekat, sebab manusia membutuhkan sesuatu dari lingkungan untuk kehidupannya.

Beberapa pernyataan tentang kualitas lingkungan meliputi kualitas perairan, udara dan lingkungan sekitarnya serta bagaimana peran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Berdasarkan Tabel 2., penilaian responden terhadap kondisi lingkungan dan pengelolaannya secara menyeluruh mempunyai nilai kisaran 5,41 hingga 7,25, dengan rata-rata sebesar 6,20. Nilai ini terkait penilaian masyarakat yang memberikan pemaknaan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Nilai rata-rata kondisi lingkungan dan pengelolaannya di wilayah Jayapura dan sekitarnya yang berada pada nilai 6,20. Artinya bahwa kondisi status lingkungan termasuk kategori *baik*.

Berdasarkan laporan KLHK (2020), secara umum indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tahun 2019 di Provinsi Papua mencapai 81,79. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Papua Barat, namun lebih tinggi dari provinsi lain. Selain itu, nilai indeks kualitas air di Papua 47,29, kualitas udara 92,56, dan kualitas tutupan lahan 99,58. Nilai tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Di Papua Barat, indeks kualitas tutupan lahan masih tinggi mencapai 100. Banyak potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Papua, diantaranya adalah keberadaan industri makanan dan minuman, bahan bangunan, rotan, pengolahan kayu, pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, peternakan, industri pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, dan timbulan sampah.

Hasil penilaian dengan kategori baik berarti bahwa masyarakat melihat kondisi lingkungan secara keseluruhan masih tergolong baik, yang

didukung oleh perhatian pemerintah daerah di kawasan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom. Daya dukung lingkungan masih tergolong baik. Walaupun demikian, perlu ditindaklanjuti dengan sistem pembelajaran kepada masyarakat dan peran pemerintah untuk meningkatkan beberapa nilai yang masih belum maksimal. Kondisi ini berbeda apabila kita menilai berdasarkan atas kondisi masing-masing kabupaten/kota. Menurut Kulin & Sevä (2019), peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan dapat terwujud dengan baik demi menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di kawasan Jayapura (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom) tentang pengelolaan lingkungan sebanyak 53–90% responden memahami. Pengetahuan masyarakat tersebut diperoleh dari dunia pendidikan/sekolah (90%). Pendapat masyarakat tentang keterlibatan peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan sebesar 69–76%, penyediaan sarana prasarana 52–74%, pengawasan pemerintah 41–71%.

Penilaian responden tentang kondisi lingkungan dan pengelolaannya di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya dengan nilai rata-rata sebesar 6,20 yang berarti pada status kategori Baik. Berdasarkan kesimpulan ini, maka perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun agar dapat mengukur dan menilai kondisi lingkungan hidup yang ada di sekitar kawasan Jayapura. Terkait hal tersebut, dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M., D. Basyir, dan Alfitri. 2015. Hubungan pengetahuan dan etika lingkungan dengan sikap dan perilaku menjaga kelestarian lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 13(1): 36-41.

- Barrable, A. 2019. Refocusing Environmental Education in the Early Years: A Brief Introduction to a Pedagogy for Connection. *Education Sciences*. 9(61): 1-8. doi:10.3390/educsci9010061.
- Chrystomo, L.Y., Suharno, dan P. Sujarta. 2019. Pengetahuan lingkungan. Uncen Press. Jayapura.
- Diarto, B. Hendrarto, dan S. Suryoko. 2012. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan hutan mangrove Tugurejo di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 10(1): 1-7.
- Fitryani, I. 2013. Pemberitaan dan persepsi masyarakat tentang lingkungan hidup di media cetak lokal Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 11(1): 17-29.
- Hawley, A.H. 1986. *Human ecology: A theoretical essay*. The University of Chicago Press. London.
- Hilborn, R. 2007. Moving to sustainability by learning from succesfull fisheries. *Ambio*. 36(4): 296-303.
- KLHK. 2020. *Index kualitas lingkungan hidup Tahun 2019*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Kulin, J., and I.J. Sevä. 2019. The Role of Government in Protecting the Environment: Quality of Government and the Translation of Normative Views about Government Responsibility into Spending Preferences, *International Journal of Sociology*. 49(2): 110-129.
- Mardanugraha, E., B.P. Resosudarmo, B. Pharmasetiawan, A. Halimatussadiyah, dan A. Nugraha. 2002. Analisis dan penyusunan indeks pengelolaan lingkungan hidup daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. 1(3): 325-342.
- Monic, J.A., I.M. Sudarma, dan I.W. Suarna. 2016. Perception and attitude towards community systems reduce reuse recycle (3R) in waste management in Dili. *Jurnal Ecotrophic*. 10(2): 137-141.
- Narsuka, D.R., dan Sujali. 2009. Persepsi Dan Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan TNGM. *Majalah Geografi Indonesia*. 23(2): 90-108.
- Purwanti, I.F., dan I. Susilo. 2012. Persepsi publik mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang. *Jurnal Diponegoro Journal Economics*. 1(1): 1-7.
- Rini, A.S., I.P.G. Sukaatmadja, dan I.G.A.K. Giantari. 2017. Pengaruh pengetahuan lingkungan dan kepedulian lingkungan terhadap sikap dan niat beli produk hijau "The Body Shop" di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 6(1): 137-166.
- Salim, H.K., R. Padfield, S.B. Hansen, S.E. Mohamad, A. Yuzir, K. Syayuti, M.H. Tham, and E. Papargyropoulou. 2018. Global trends in environmental management system and ISO14001 research. *Journal of Cleaner Production*. 170: 645-653.
- Suandana, I.N., N.K. Mardani, dan N. Wardi. 2011. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ecotrophic*. 6(1): 50-55.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sujarta, P. 2015a. Ekologi ikan karang di perairan pesisir Teluk Tanah Merah Jayapura Papua. *Prosiding Seminar Nasional PBI XXIII*. Uncen Press, Jayapura. ISBN: 978-602-7905-54-2.
- Sujarta, P. 2015b. Kajian status sistem Tiyaitiki di perairan pesisir Teluk Tanah Merah, Jayapura Papua. *Prosiding Seminar Nasional Biosains 2*. Jurusan Biologi dan Prodi Magister Biologi Universitas Udayana, Bali. ISBN: 978-602-294-093-7.
- Sujarta, P., dan H.L. Ohee. 2009. Pola distribusi teripang di sekitar kawasan konservasi Tiyaitiki Kampung Tablasupa, Distrik Depapre Jayapura. *Kaunia Jurnal Sains dan Teknologi Dalam Islam*. 5(1): 38-43.
- Sujarta, P., H.L. Ohee, dan E. Rahareng. 2011. Kajian keragaman plankton dan ikan di perairan Teluk Tanah Merah, Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Biologi Papua*. 3(2): 67-73.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Widiyoko, S.E.P. 2012. *Teknik penyusunan instrumen penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.